

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi dan sebagai wujud dari keikutsertaan warga dalam menjalankan kedaulatan nya berdasarkan kesadaran sendiri. Dalam hal ini partisipasi politik merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap tatanan kehidupan maupun penyelenggaraan pemerintahan.¹ Penting partisipasi politik masyarakat untuk merangsang dinamika politik agar tercapai kematangan demokrasi. Demokrasi sangat penting mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam ketatanegaraan Indonesia. Dalam hal ini rakyat berada pada posisi yang penting mempunyai kekuasaan menentukan penyelenggaraan pemerintah ini berlaku dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Pemerintahan Desa. Kematangan demokrasi akan tergantung seberapa besar partisipasi politik masyarakat.²

Partisipasi politik dapat dilaksanakan karena adanya kesadaran masyarakat bahwa pemilihan umum merupakan sarana mewujudkan asas kedaulatan rakyat yang dimiliki oleh setiap warga negara. Meskipun partisipasi politik masih terbatas pada pemilihan umum.

¹ Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 585-610.

² *Ibid*

Baik di tingkat Nasional, atau Desa, masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum. Pada dasarnya pemilihan umum diartikan untuk melaksanakan kepentingan kedaulatan rakyat, memilih wakil rakyat, meyakinkan memperbaharui kesepakatan warga negara, dan mendidik penguasa untuk semakin bergantung pada kesepakatan rakyat daripada memaksa rakyat untuk mempertahankan legitimasinya.³ Keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan umum merupakan bukti positif bahwa partisipasi politik telah dilakukan dengan baik. Dengan melaksanakan kedaulatannya secara maksimal maka akan tercipta hubungan antara pemegang kekuasaan dan pelaksana kekuasaan yang lebih erat disatu sisi.⁴

Partisipasi politik merupakan elemen kunci dalam sistem demokrasi, termasuk dalam konteks pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan control masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan. Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang mereka pilih. Permasalahan pemilu sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan utamanya adalah hasil

³ Pardede, M. (2014). Implikasi sistem pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 85-99.

⁴ *Ibid*

atau substansi dari pemilu masih jauh seperti yang diharapkan.⁵ Huntington dan Nelson menjelaskan mengenai spektrum partisipasi politik tersebut. Menurut mereka, ada dua jenis partisipasi politik yang bergerak pada satu

garis spektrum yaitu:

a. Partisipasi Otonom (Otonomous)

Partisipasi otonom adalah jenis partisipasi yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Pada jenis ini, keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan mengenai ide dan konsep tentang suatu hal pada pemerintah, mendirikan partai politik, menjadi kelompok penekan bagi pemerintah, memberikan haknya pada pemilihan umum, dan sebagainya.

b. Partisipasi Mobilisasi

Partisipasi yang dimobilisasi lebih mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan atau program, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Artinya, dalam partisipasi yang dimobilisasi manipulasi dan tekanan dari pihak lain sangat signifikan terhadap partisipasi individu atau kelompok.

Hal ini partisipasi politik memiliki sifat spektrum, justifikasi, bahwa ada dua kubu yang saling bertentangan adalah tidak benar pengertian yang tepat dalam konteks tersebut bahwa masyarakat lebih efektif apabila diperintah dengan cara dimobilisasi, tetapi pada saat lain, masyarakat akan lebih sinergis apabila diberi

⁵ Daud Lindo. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016.

otonomi secara luas ini artinya, partisipasi otonom bisa berbalik secara drastis menuju partisipasi yang dimobilisasi.⁶

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil pemerintah. Istilah “partisipasi politik” telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik.⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat merupakan indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan.⁸

Partisipasi politik yang seharusnya berjalan beriringan dengan visi pemerintahan desa menjadi terhambat karena kurangnya kepedulian dan kerjasama antara pemerintahan desa dan masyarakat sebagai garda terdepan dalam kemajuan suatu daerah. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang seharusnya menjadi mitra dari pemerintahan desa, tidak berjalan sebagaimana tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa.⁹

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sejalan dengan pendapat Conyers yang lebih lanjut mengemukakan tiga alasan utama

⁶ Yudi, A. G. (2015). Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 (Studi Deskriptif pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area).hlm 23

⁷ Hardiyanti, S., & Zetra, A. (2021). Partisipasi Politik Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Lubuk Tenam Jambi. *Jurnal Niara*, 14(1), 276-283.

⁸ Ibid

⁹ AL-PAJRI, D. I. M. A. S. (2023). *EKSISTENSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA NYOGAN KECAMATAN MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI* (Doctoral dissertation, Hukum Administrasi Negara).

mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat yang sangat penting :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.¹⁰

Salah satu tantangan keterlibatan partisipasi politik masyarakat yang substansial adalah lahirnya politik dinasti diberbagai spektrum kewilayahan yang terjadi dipemerintahan Indonesia salah satunya di Desa. Politik dinasti dapat mengakibatkan penurunan tingkat partisipasi politik di dalam negeri ataupun nasional. Ketika kekuasaan terpusat pada satu keluarga atau kelompok, masyarakat cenderung merasa bahwa hak suara mereka tidak berarti yang mengakibatkan apatisme politik, di mana masyarakat merasa tidak memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan politik, rendahnya partisipasi ini dapat mengurangi legitimasi

¹⁰ Ibid

pemerintah dan menghambat perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini.¹¹

Dalam pembangunan politik kerap terjadi dinasti politik, dimana dinasti politik merupakan upaya kerabat mereka pada posisi strategis dengan tujuan untuk membangun kerajaan politik dalam pemerintahan seorang penguasa untuk menempatkan anggota keluarga mereka, saudara.¹² Dinasti politik adalah strategi seseorang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Dalam artian bahwa sebuah lembaga politik, mereka yang masih mempunyai hubungan dekat dengan keluarga sering kali mendapatkan keistimewaan untuk mendapatkan posisi penting dalam puncak hirarki kelembagaan organisasi.¹³ Hal ini kemudian menyebabkan proses demokratisasi memunculkan masalah diantaranya seperti politik uang, penyalahgunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi ataupun dinasti.¹⁴

Dinasti Politik didominasi dari unsur keluarga kepala desa yang sedang berkuasa bahkan bisa melibatkan keluarga jauh.¹⁵ Sebagian besar penduduk Indonesia

¹¹ <https://kumparan.com/m-zaqqi/politik-dinasti-terhadap-partisipasi-politik-dan-kualitas-pemimpin-di-indonesia>

¹² Leo Agustinus. "Politik Lokal dan Otonomi Daerah". Bandung : Alfabeta, 2014, hlm. 209-211.

¹³ Diakses di website <https://babel.bawaslu.go.id/kekuasaan-dinasti-politik/>

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Mega Lestari. "Dinasti Politik Dalam Prefektif Demokrasi". 2021.

(80%) tinggal di pedesaan, dimana pedesaan ini sangat penting bagi negara. Pada tahun 2018, ada 75.436 desa yang berada di bawah administrasi pemerintahan.¹⁶

Praktik dinasti politik telah terjadi diberbagai daerah di Indonesia salah satunya, di Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di Desa Nyogan yang terbentuk pada tahun 1986, hal ini sangat berpotensi mengurangi keberagaman perspektif dalam kepemimpinan dan menghambat inovasi dalam kebijakan publik. Praktik ini dapat memunculkan iklim politik tertutup dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Perilaku pemilih di Desa Nyogan juga dipengaruhi faktor social dan budaya yang mendukung praktik dinasti politik. Adanya rasa saling percaya dan hubungan emosional antara pemilih dan calon menyebabkan masyarakat cenderung memilih berdasarkan kedekatan social daripadakualifikasi atau program yang ditawarkan oleh kandidat lain. Selain itu, kurangnya kesadaran politik akan proses demokrasi yang dapat memperburuk situasi.

Dalam pemilihan Kepala Desa Nyogan selalu dimenangkan oleh tokoh lama, hal ini dipengaruhi oleh faktor pemilih yang memiliki tali kekerabatan yang masih sangat erat. Dimana Kepala Desa berasal dari satu suku yang sama dengan mayoritas masyarakat. Masyarakat Desa Nyogan masih sangat menghormati tokoh adat atau sesepuh desa sehingga pemilihan kepala desa tidak didasari oleh hati nurani dan tidak dilihat dari kapasitas calon melainkan hanya mengikuti arahan dari tokoh adat dan sesepuh desa. Pada tahun 1986 terjadi pemekaran di Desa Pelempang, maka

¹⁶ Jopang Liwaui dan Muhammad Yunus, “Analisis Partisipasi dan Perilaku Pemilih Menjelang Pemilihan Desa Serentak”, Jurnal AKP 8, no. 2,

terbentuklah Desa Nyogan. Kepala Desa Palempang saat itu adalah salah satu tokoh yang dikenal Datuk Maliki, yang ternyata memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kepala Desa Nyogan pertama, yaitu Harun Muhammad Dun. Terdapat praktik regenerasi kekuasaan yang dilakukan oleh Keluarga Harun Muhammad Dun yang terjadi dipemerintahan desa, praktik dinasiti politik sudah terjadi turun temurun sejak desa ini didirikan. Dimulai lagi kepemimpinan Harun Muhammad Dun selama tiga periode, kemudian posisi tersebut berhasil di duduki oleh Muhammad Asrul selaku menantunya dan pada tahun 2021 pemilihan kepala desa yang ke-3 berhasil menang mutlak yang duduki oleh Rosita yang merupakan istri dari Muhammad Asrul yang merupakan menantu dari Harun Muhamad Dun dan beliau menjabat hingga saat ini.

Dengan penjelasan di atas maka peneliti melampirkan data nama – nama kepala desa di Desa Nyogan dari masa ke masa sebagai tinjauan mendalam sebagai berikut :

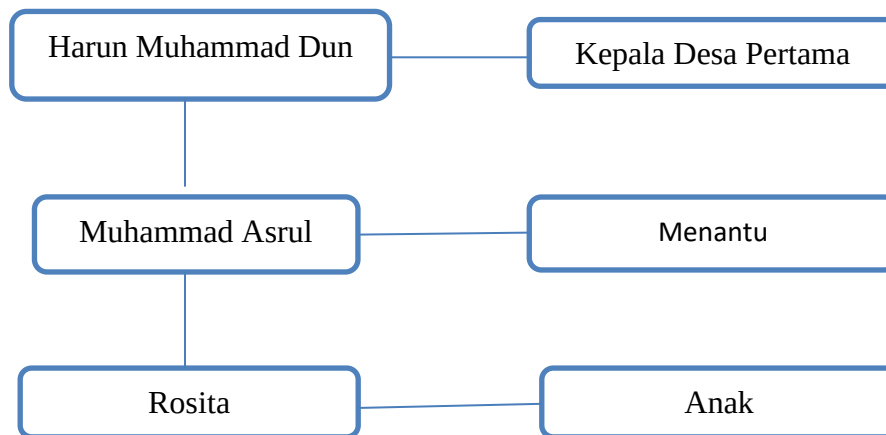
Data 1.1 Nama – Nama Kepala Desa Nyogan Dari Masa ke Masa

No	Nama Kepala Desa	Periode
1.	Harun Muhammad Dun	1986 – 2003
2.	Muhammad Asrul	2004 – 2021
3.	Rosita	2021 – Sekarang

Harun Muhammad Dun yang merupakan kepala desa pertama di desa Nyogan, Kecamatan Mestong pada tahun 1986-2003, beliau memimpin selama 3 periode.

Yang kemudian kepemimpinannya di lanjutkan oleh anak – anaknya Untuk memberikan informasi dengan data yang valid maka peneliti memberikan tabel struktur dinasti politik kepada Desa Nyogan sebagai berikut : **Data 1.2 Struktur**

Dinasti Politik Kepala Desa Nyogan



Dari informasi yang di dapatkan dari masyarakat desa nyogan maka di dapatkanlah beberapa fakta salah satunya masyarakat bernama “Slamet” yang merupakan masyarakat perantau asal pulau jawa tepatnya dari provinsi Jawa Tengah, meskipun bukan masyarakat asli desa nyogan, bapak Slamet telah cukup lama menempati desa tersebut dan ikut merasakan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pemerintah desa Nyogan karena selain menjadi masyarakat. Bapak Slamet mempunyai pandangan tersendiri tentang idealnya suatu pemerintah desa berjalan dengan membandingkan desa tempat tinggalnya sewaktu di Pulau Jawa. Meskipun menjadi bagian tidak langsung dari pemerintah desa dengan jabatannya sebagai ketua rukun tetangga (RT) aktif, tidak melunturkan semangat mudanya dalam mengkritik hal-hal yang tidak sejalan dengan idealismenya. Banyak kebijakan-kebijakan kepala

desa Nyogan saat ini yang dinilai tidak efektif, tidak tepat sasaran bahkan dinilai tidak berguna sama sekali.¹⁷

Kedua, masyarakat desa nyogan salah satunya saat penulis berdialog dengan masyarakat bernama “Ibu Siti” yang merupakan masyarakat desa Nyogan mengatakan bahwa kurang nya kesempatan bagi masyarakat lain untuk ikut andil dalam berpendapat bahwa pemerintahan yang dominan dikuasai oleh satu keluarga dapat mengakibatkan pengelolaan dana publik menjadi tidak efektif, sehingga sangat menghambat kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan infrastruktur. Sehingga sebagai masyarakat di desa ini melihat bahwa praktik dinasti politik sangat menghambat keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses keputusan pemerintahan, masyarakat tidak memiliki peluang yang setara untuk ikut berpartisipasi dalam proses keputusan pemerintahan.¹⁸

Ketiga, ketua Badan Permusyawaratan Desa Nyogan yang bernama “Bapak Idris” yang merupakan masyarakat di desa Nyagan juga menyatakan bahwa pembangunan politik yang terjadi di desa tersebut sangat la kurang efisien, karena praktik dinasti politik dapat mengarahkan penempatan posisi perangkat desa tidak sesuai keahlian pada penempatan posisi yang tidak sesuai keahlian, hal ini dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena mereka

¹⁷ Wawancara bersama Bapak Slamet

¹⁸ Wawancara bersama Ibu Siti

kurangnya kepercayaan bahwa pemerintah dapat mengelola dana publik dengan baik.¹⁹

Di Desa Nyogan benar ditemukan indikasi praktik dinasti politik keluarga, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak dinasti terhadap partisipasi politik dan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa Nyogan, dikarenakan dialog yang terjadi dengan masyarakat menghasilkan komentar yang beragam, ada yang negatif adapula yang positif, tetapi penilaian positif yang disampaikan masyarakat justru membuat penulis terpacu karena apa yang dilihat, disaksikan dan dirasakan penulis saat berada di lokasi tidak pula sedemikian dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat yang menilai positif dinasti politik terhadap partisipasi politik dan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa nyogan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dinasti politik terhadap partisipasi politik dan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa, mengetahui bagaimana dinasti tersebut berkembang, dan bagaimana keberlangsungan dari pemerintahan itu sendiri sepanjang periode dinasti. Adapun proses pemilihan langsung tidak dapat melunturkan dinasti politik dalam pemerintahan desa, keluarga ini selalu memegang jabatan dimulai dari kepala desa hingga mendistribusikan anggota keluarga kedalam staff pemerintahan tanpa melalui prosedur yang berlaku sehingga faktor kompetensi ini dapat mempengaruhi kinerja terhadap masyarakat . Kemenangan kekuatan politik lama dalam tiap pemilihan kepala desa Nyogan dapat dilihat sebagian perihal awal, jaringan kekuasaan yang dipunyai elit lama yang terdiri

¹⁹ Wawanara bersama Bapak Idris

dari anggota keluarga serta orang-orang dekat yang masih berpengaruh untuk memenangkan kontestasi memperebutkan kekuasaan, dan praktik dinasti politik dapat menghambat keterbukaan, partisipasi.

Penelitian terlebih dahulu terkait penelitian yang akan dilakukan. Pertama Muhammad Taher Siregar, M. Arif Nasution, dan Marlon Sihombing. Dengan judul “Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa Mangaledang Lama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara” Tahun 2021. Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan masalah yang dibahas di Desa Mangaledang Lama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan secara menyeluruh asal-usul, penyebab, dan dampak politik dinasti tersebut. Beberapa faktor penyebabnya yaitu kepemilikan modal ekonomi yang mapan secara finansial, memiliki modal sosial seperti jaringan yang kuat dalam kalangan masyarakat, memiliki modal simbolik yaitu marga Siregar yang dikenal sebagai marga penguasa yang sangat mendominasi sehingga jika dibandingkan dengan marga lain sangat jauh kekalahan nya dengan marga Siregar. Dampaknya yaitu kekuasaan hanya berputar-putar di keluarga itu sendiri. Perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya perbedaan tajam dimana rata-rata pembicara dinasti politik itu selalu menyangkut terkait proses pemilihan atau proses perputaran kekuasaan, tetapi tidak banyak yang kemudian menumpahkan gagasan dinasti untuk mengulik partisipasi politik masyarakat. Kemudian peneliti memfokuskan bahwa penelitian ini terkonseptasi di konteks dinasti desa terkait yaitu

lokasi, karakteristik masyarakat, lingkungan sosial dan budaya, serta sistem adat yang membahas tentang praktik dinasti politik terhadap partisipasi politik dan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa secara komperhensif.²⁰

Penelitian kedua Poleh Adelia Fitri dengan judul “Dinasti Politik Pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi fenomena politisi local yang melanggengkan kekuasaan melalui dinasti politik pada pemerintahan di tingkat lokal. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dinasti politik terjadi karena beberapa adanya beberapa faktor. Pertama, dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, perilaku politik individu akan sangat dipengaruhi oleh produksi faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologi, sejarah, politik dan budaya. Kedua, tidak adanya pembatasan perodesasi membuat kandidat yang memiliki karismatis dan popularitas di masyarakat terus mencalonkan diri sebagai kesempatan besar bagi keluarga untuk ikut dalam politik elektoral ditingkat local. Penelitian ini fokus pada kajian mengupas sistem elektoral yang terjadi di tingkat lokal melalui aktor politisi yang membangun dinasti politik di Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau dijadikan wilayah pengkajian karena masih terdapat fenomena keluarga menjadi politisi pada pemilihan umum tahun 2019. Perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya perbedaan tajam dimana rata-rata pembicara dinasti politik

²⁰ Siregar, M. T., Nasution, M. A., & Sihombing, M. (2021). Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa Mangaledang Lama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. *PERSPEKTIF*, 10(2), 678-691.

itu selalu menyangkut terkait proses pemilihan atau proses perputaran kekuasaan, tetapi tidak banyak yang kemudian menumpahkan cerita atau gagasan dinasti untuk mengulik partisipasi politik masyarakat. Kemudian peneliti memfokuskan pada analisis dinasti politik terhadap partisipasi politik masyarakat dan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa Nyogan dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.²¹ Berdasarkan pemaparan uraian dilatar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS DINASTI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA NYOGAN KECAMATAN MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI”**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini bertujuan untuk menegaskan kembali masalah yang akan dikaji, sehingga penyelesaian masalah bisa ditentukan dengan tepat dan mendapat tujuan dari penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana dampak dinasti politik terhadap partisipasi politik dan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengetahui dampak dinasti politik terhadap partisipasi dan perilaku pemilih

²¹ Adelia Fitri “Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal” Jurnal Ilmu Pemerintahan Magister Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Volume 04 Nomor 01 Agustus 2019.

dalam pemilihan kepala desa Nyogan Kecamatan Mestong di Kabupaten Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar nantinya di harapkan dapat memberikan umpan balik atau manfaat kepada berbagai pihak. Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang ada, terutama bagi mahasiswa ilmu politik dan juga bagi mahasiswa lainnya yang tertarik dengan dinasti politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca yaitu, semakin menambah pengetahuan penulis tentang Dampak Dinasti Politik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan informasi tentang dampak dinasti politik.

1.5 Landasan Teori

Perbedaan menggunakan teori yang dianggap dengan konsep bentuk dinasti politik untuk menganalisis lebih dalam tentang dinasti politik terhadap partisipasi politik di desa Nyogan.

1.5.1 Teori Perilaku Politik (Politic Behaviour)

Perilaku politik merupakan tindakan atau kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Perilaku politik yaitu interaksi antara

pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik.²² Perilaku politik pada dasarnya adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik.²³

Perilaku politik juga termasuk kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan. Perilaku politik tentu berhubungan dengan kegiatan politik. Oleh karena itu, perilaku politik dibagi menjadi dua, yakni di satu pihak perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah, dan di lain pihak perilaku politik warga negara biasa atau partisipasi politik. Sehingga dapat diketahui model perilaku politik dalam rangka kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih 3 kemungkinan unit analisis untuk mengetahui model perilaku politik secara mendalam diantaranya sebagai berikut:

- a. Individu aktor politik, yang dimaksud dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga negara biasa.
- b. Agregasi politik, yang dimaksud dengan agregasi ialah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan bangsa.

²² Vevekananda, D. S. (2017). *Perilaku Politik Dan Kekuasaan Politik (Studi Perpindahan Partai Politik Basuki Tjahaja Purnama dalam Perpolitikan di Indonesia)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).

²³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

- c. Tipologi kepribadian politik, sedangkan dalam tipologi kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, dan demokrat.²⁴

Menurut Ramlan Surbakti bahwa perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik. Perilaku politik merupakan salah unsur atau aspek perilaku secara umum, disamping perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen/ekonomi, perilaku keagamaan dan lain sebagainya.²⁵ Menurut pendapat Ramlan Surbakti perilaku politik dibagi 2 (dua), yaitu : Perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakan keputusan politik dan perilaku politik warga negara maupun individu kelompok yang berhak mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pemerintah menyangkut kehidupan warga negara tersebut.²⁶

Menurut Sobolim Perilaku politik atau (*Politic Behaviour*) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh

²⁴ *Ibid*

²⁵ Ramlan Surbakti. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

²⁶ *Ibid*

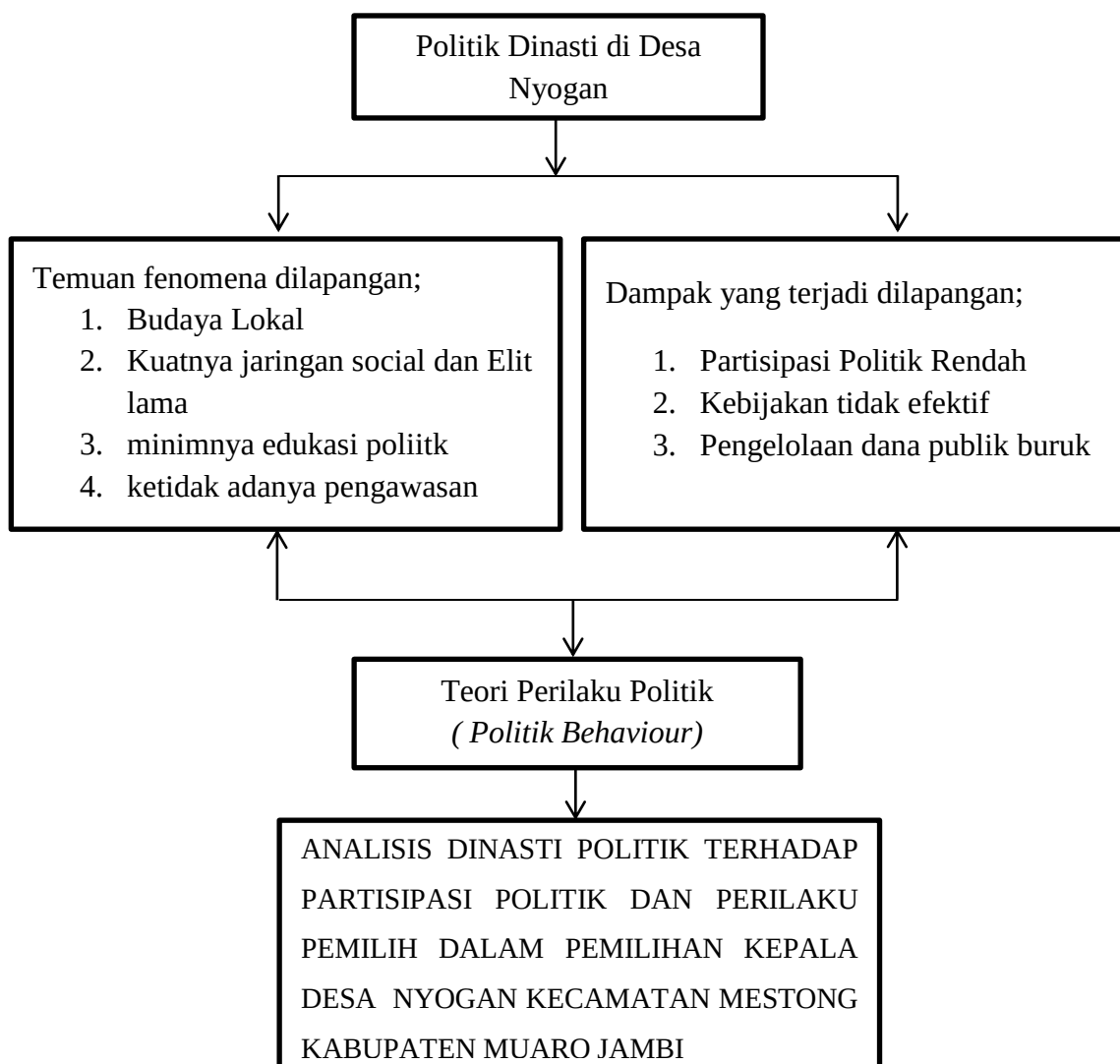
negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik adalah: ²⁷

- a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
- b. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau LSM (lembaga swadaya masyarakat)
- c. Ikut serta dalam pesta politik
- d. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
- e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik
- f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undangundang dasar danperundangan hukum yang berlaku.

²⁷ Hasanah, U., Kirani, C., Gabylia, E. M., & Adawiyah, R. (2022). Etika Dan Budaya Politik “Konsep Sistem Politik Di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 1(1), hlm. 340.

1.6 Kerangka Berfikir

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori dan permasalahan yang sudah dijelaskan, berikut ini adalah model kerangka berfikir dari penelitian tersebut:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Fenomena politik dinasti di Desa Nyogan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam proses demokrasi di tingkat desa, hal ini muncul karena pengaruh budaya lokal, di mana masyarakat sangat menghormati tokoh adat dan lebih memilih calon kepala desa berdasarkan kekerabatan dibandingkan kapasitas. Fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dan kinerja pemerintahan desa. Praktik dinasti politik mengakibatkan rendahnya tingkat keterbukaan, minimnya peluang bagi masyarakat lain untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, serta penempatan perangkat desa yang sering kali tidak didasarkan pada kompetensi dan praktik dinasti ini diperkuat oleh jaringan sosial dan kekuatan elit lama yang terus mempertahankan posisi strategis dalam pemerintahan desa. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti rendahnya partisipasi politik masyarakat, kebijakan yang tidak efektif, dan pengelolaan dana publik yang kurang transparan. Selain itu, penempatan perangkat desa yang tidak sesuai kompetensi turut menurunkan kualitas pemerintahan desa.

Dengan mengacu pada temuan di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dinasti politik terhadap partisipasi politik dan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa Nyogan. Penelitian ini juga akan menggali lebih dalam bagaimana dinasti politik terbentuk, bertahan, dan memengaruhi keberlangsungan demokrasi di tingkat lokal.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuannya untuk memecahkan satu masalah dan mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat dan saling mendukung agar tidak mengambil kesimpulan yang tidak diinginkan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian kualitatif yaitu tipe penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata atau kalimat. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena apa yang terjadi pada suatu penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan tertulis atau secara lisan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.²⁸ Serta menganalisis dan menggambarkan fenomena, penyebab, dampak, dan pemikiran masyarakat tentang pembangunan dinasti politik terhadap partisipasi politik di desa

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk mengungkap masalah dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, pemuda, dan budaya sehingga dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang baik untuk kesejahteraan bersama.²⁹ Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan data analisis data bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya

²⁸ J.R Raco. *Metode Penelitian Kualitatif “Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya”*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm.5.

²⁹ Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 80-81.

serta mendapatkan informasi mendalam tentang masalah atau isu tertentu melalui wawancara dan observasi dalam mengumpulkan data .³⁰

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini karena Desa Nyogan adalah satu-satunya desa di Kecamatan Mestong yang memiliki dinasti politik terhadap partisipasi politik dan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa. Ini karena, dibandingkan dengan semua desa lain di Kecamatan Mestong, kepala desa yang terpilih setiap pemilihan selalu memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa sebelumnya.

1.7.3 Fokus Penelitian

Dalam Penelitian ini memiliki fokus untuk memfokuskan sebuah permasalahan yang di teliti. Oleh karena itu, fokus penelitian penulis adalah analisis dinasti politik terhadap partisipasi politik dan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa di Desa Nyogan oleh keluarga Harun Muhammad Dun di desa Nyogan.

1.7.4 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh di lapangan atau penting, seperti yang diperoleh dari wawancara langsung dengan narasumber atau informan. Sama hal dengan data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara peneliti dengan narasumber.

³⁰ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Yang Bersifat; Eksploratif, Interpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung, ALFABETA CV, 2018, hlm.3.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari sumber sebelumnya disebut data sekunder. Data ini dapat diperoleh dari buku-buku, dokumen, atau sumber lain. Sumber-sumber ini termasuk hasil penelitian sebelumnya tentang dinasti politik terhadap partisipasi politik masyarakat di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Saat waktunya tiba, data ini akan digunakan untuk mendukung informasi awal.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Metode penentuan informan digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan sumber data (informan). Penelitian ini dilakukan secara purposive. Purposive sampling adalah teknik penentuan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang biasa digunakan adalah orang yang diperkirakan paling paham mengenai data atau keterangan yang dibutuhkan peneliti.³¹ Sebagai sumber data untuk penelitian ini sebagai berikut:

1.3 Tabel Informan Peneliti

No.	Informan	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Slamet	Laki – Laki	RT 4 dan ketua pemuda
2	Siti	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
3	Idris	Laki – Laki	Ketua BPD Desa Nyogan
4	Restu Apriadi	Laki – Laki	Ketua karang taruna dan Rt 8

³¹ Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.

5	Jumini	Perempuan	Petani
6	Mansyur	Laki-Laki	Karyawan Swasta
7	Surinah	Perempuan	Pedagang
8	Nurtiah	Perempuan	Petani
9	Sudiono	Laki – Laki	Petani
10.	Wagiman	Laki – Laki	Tokoh Agama
11.	Swesti	Perempuan	Bidan

Adapun alasan saya untuk mewancarai informan tersebut karena mereka merupakan masyarakat yang sudah lama tinggal di desa Nyogan, dan mengetahui seluk beluk terhadap pemerintah di desa Nyogan. Dengan penentuan informan yang dinilai dapat memberikan informasi yang valid dan terbuka maka di temukan lah beberapa daftar nama – nama informan seperti atas.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dibutuhkan teknik pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder yang tepat untuk masalah yang diteliti dan tujuan penelitian. Ini karena pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai situasi, dengan berbagai sumber, dan dengan berbagai cara. Penulis menggunakan berbagai teknik untuk mempermudah penelitian ini.

a. Wawancara (*Interview*)

Menurut Esterberg Wawancara dapat dilakukan pada tahap awal penelitian atau dilanjutkan dengan wawancara penelitian yang lebih mendalam. Wawancara adalah pertemuan dua orang yang dilakukan melalui tanya jawab untuk bertukar informasi dan gagasan. Hasil wawancara dapat diolah dan digabungkan dengan penelitian lebih mendalam.³²

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi mencakup pencarian data tentang hal-hal atau variabel, seperti catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Dengan menggunakan metode dokumentasi ini, peneliti dapat mendapatkan data serta demografi penduduk untuk memberikan gambaran umum tentang wilayah objek penelitian. Ini akan membantu peneliti mengingat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, termasuk informasi, serta bentuk lain yang dapat.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Model data analisis kualitatif ini terdiri dari tiga elemen utama: reduksi data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan bersama dengan verifikasi data:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, kerangka konseptual

³² Helmuth Y. Bunu, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2022), 76.

penelitian, masalah studi, dan metode pengumpulan data yang dipilih peneliti menunjukkan bahwa reduksi data adalah proses yang difokuskan pada pemilihan, pengambilan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan tertulis di lapangan.³³

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan di mana sekumpulan informasi disusun dalam penelitian kualitatif. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori, sehingga lebih mudah bagi peneliti untuk menganalisis data yang mereka temukan.³⁴

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam menganalisis data, peneliti harus membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian dan dapat menjadi fokus penelitian berikutnya. Kesimpulan ini ditulis dalam bentuk deskriptif dan mengandung pedoman untuk penelitian.³⁵

³³ Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10), 179-188.

³⁴ Ahmad Rijali “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol 17 No. 33, 2018, hlm. 91

³⁵ *Ibid* hlm 91

1.7.8 Triangulasi Data

Triangulasi adalah penggabungan dua yaitu metode pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data. Dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, peneliti akan menganalisis berbagai data untuk memvalidasi sumber yang beragam.

Triangulasi dengan sumber yang dilakukan pengecekan data berupa wawancara berulang – ulang dengan mengajukan pertanyaan dan melampirkan dokumentasi. Teknik Triangulasi data dalam penelitian kualitatif dibagi berdasarkan data yang di periksa, adapun teknik triangulasi data dari penjelasan yaitu:

- a. Triangulasi sumber: (Data Triangulation), yang berarti menggunakan berbagai sumber data dalam penelitian
- b. Triangulasi penelitian (Investigator Triangulation), yang berarti menggunakan beberapa peneliti dari berbagai disiplin ilmu dalam suatu penelitian.
- c. Triangulasi metodologis (Methodologi Triangulation), yang berarti menggunakan sejumlah perspektif metodologis dalam suatu penelitian.